GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan
ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 11 November 2026

RELASI KEMANDIRIAN FISKAL DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN DALAM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH: STUDI KASUS KABUPATEN LAMPUNG TIMUR PERIODE 2023–2025

Miftahul Arifin[1], Feni Rosalia[2], Robi Cahyadi Kurniawan[3]
[1,2,3]Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Lampung
Email Korespondensi: miftahularifin22032002@gmail.com

ABSTRACT

Fiscal independence and income inequality are two critical dimensions in evaluating regional development policies. East Lampung Regency shows positive economic growth, yet its fiscal independence remains low. This study aims to analyze fiscal independence levels, examine income inequality dynamics, and identify their relationship during 2023–2025. A qualitative approach with literature review was employed, using data from realized regional budgets, BPS statistics, and scientific literature. Descriptive-comparative and interpretative analyses were conducted. Results indicate that fiscal independence remains low (DOF ratio of 10.25%, "Low" category), while income inequality consistently declined (Gini Ratio from 0.315 to 0.261). The dominant inequality-reduction mechanism stems from effective utilization of central transfer funds through social assistance and grant expenditures, rather than increased fiscal independence. The relationship is conditional and non-linear. Regional development policies should adopt a dual-track approach: gradually strengthening original regional revenue while enhancing transfer fund effectiveness for equity programs..
Keywords: Fiscal independence, Income inequality, Regional development policy.

ABSTRAK

Kemandirian fiskal dan ketimpangan pendapatan merupakan dua dimensi kritis dalam evaluasi kebijakan pembangunan daerah. Kabupaten Lampung Timur menunjukkan pertumbuhan ekonomi positif, namun kemandirian fiskalnya masih rendah. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat kemandirian fiskal, mengkaji dinamika ketimpangan pendapatan, serta mengidentifikasi relasi keduanya pada periode 2023–2025. Pendekatan kualitatif dengan studi pustaka digunakan, dengan data dari realisasi APBD, statistik BPS, dan literatur ilmiah. Analisis dilakukan secara deskriptif-komparatif dan interpretatif. Hasil menunjukkan kemandirian fiskal masih rendah (DOF 10,25%, kategori "Kurang"), sementara ketimpangan pendapatan menurun konsisten (Gini Ratio 0,315 menjadi 0,261). Mekanisme dominan penekanan ketimpangan berasal dari penggunaan efektif dana transfer pusat melalui belanja bantuan sosial dan hibah, bukan dari peningkatan kemandirian fiskal. Relasi keduanya bersifat kondisional dan tidak linear. Kebijakan pembangunan daerah perlu mengadopsi pendekatan *dual-track*, yaitu memperkuat PAD secara gradual sambil meningkatkan efektivitas penggunaan dana transfer untuk program pemerataan.
Kata kunci: Kemandirian fiskal, Ketimpangan pendapatan, Kebijakan pembangunan Daerah.

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah dalam perspektif politik dan kebijakan publik tidak dapat dipisahkan dari kapasitas fiskal pemerintah daerah. Sejak implementasi otonomi daerah, paradigma pembangunan telah mengalami transformasi dari sentralisme menuju desentralisasi fiskal yang memberikan diskresi lebih besar kepada daerah dalam mengelola sumber daya ekonomi lokal (Mardiasmo, 2002). Dalam konteks ini, Mardiasmo (2002) menegaskan bahwa esensi otonomi daerah pada hakikatnya adalah mensejahterakan masyarakat melalui penguatan kapasitas fiskal. Namun demikian, kesejahteraan tidak

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 11 November 2026

semata-mata ditentukan oleh magnitudo anggaran, melainkan juga oleh distribusi pendapatan yang merata. Ketimpangan pendapatan yang tinggi dapat menggerogoti dampak positif belanja pemerintah terhadap kualitas hidup masyarakat..

Hubungan antara kapasitas fiskal daerah dan kesejahteraan masyarakat telah menjadi fokus perhatian utama dalam studi keuangan publik kontemporer. Syahrimi dkk. (2025) mengemukakan bahwa indeks kemandirian fiskal memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Sumatera. Siburian, (2020) berargumen bahwa desentralisasi fiskal di Indonesia berkorelasi dengan penurunan disparitas pendapatan antarwilayah, meskipun penyediaan barang publik lokal dapat memperburuk ketimpangan akibat disparitas kondisi awal pembangunan. Fahriansyah & Zulfikar, (2022) menambahkan bahwa kemandirian keuangan daerah yang rendah berkorelasi langsung dengan keterbatasan pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perspektif teoretis mengenai desentralisasi fiskal telah dikembangkan secara klasik oleh Tiebout, (1956) melalui konsep voting with feet, yang menyatakan bahwa mobilitas konsumen-voter terhadap komunitas yang menawarkan paket barang publik lokal tertentu dapat mengungkapkan preferensi mereka secara efisien. Musgrave, (1959) selanjutnya mengelaborasi fungsi alokatif, distributif, dan stabilisasi dalam kerangka federalisme fiskal, sementara Oates, (1972) memformulasikan decentralization theorem yang menjadi landasan teoretis desentralisasi fiskal.

Kabupaten Lampung Timur menghadapi tantangan ganda dalam kebijakan pembangunannya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami eskalasi absolut dari Rp181,49 miliar (2023) menjadi Rp249,79 miliar (2025), namun rasio Derajat Otonomi Fiskal (DOF) rata-rata hanya 10,25% dengan klasifikasi Kurang hingga Sangat Kurang. Indeks Kemampuan Rutin (IKR) rata-rata 14,77% juga masuk kategori Kurang. Ketergantungan pada dana transfer pusat sangat tinggi dengan rasio Ketergantungan Keuangan Daerah (KKD) rata-rata 85,07% (kategori Sangat Tinggi), mencerminkan fenomena pseudo-decentralization yang diidentifikasi Akadun, (2024), di mana daerah secara administratif otonom namun secara fiskal masih sangat bersifat kontingen terhadap pusat.

Di sisi ketimpangan pendapatan, Gini Ratio Kabupaten Lampung Timur mengalami deklinasi dari 0,315 (2023) menjadi 0,261 (2025), meskipun masih di atas ambang batas moderat 0,25. Persentase penduduk miskin turun dari 13,8% menjadi 13,19%, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 72,44 menjadi 73,05, dan pertumbuhan ekonomi naik dari 3,51% menjadi 4,65%. Fenomena yang menarik adalah deklinasi ketimpangan terjadi meskipun kemandirian fiskal daerah tergolong rendah, mengindikasikan adanya mekanisme intermediasi seperti efektivitas penggunaan dana transfer pusat dan belanja sosial. Namun, efektivitas PAD masih berkategori Tidak Efektif dengan rata-rata realisasi 89,42% dari target.

Tinjauan pustaka menunjukkan adanya kesenjangan penelitian mengenai relasi kemandirian fiskal dan ketimpangan pendapatan pada tingkat kabupaten dengan karakteristik ekonomi pertanian dan ketergantungan fiskal tinggi. Syarifudin & Suwandi, (2025) menganalisis ketimpangan fiskal pasca UU HKPD di Jawa Tengah. Herianti & Marundha, (2024) meneliti dampak desentralisasi fiskal terhadap kinerja ekonomi di Sumatera Barat. Siburian, (2020) menguji empiris hubungan desentralisasi fiskal dan ketimpangan pendapatan regional di Indonesia. Farida dkk., (2021) meneliti desentralisasi fiskal, pertumbuhan ekonomi, dan ketimpangan pembangunan regional di Indonesia Timur. Martinez-Vazquez dkk., (2017) menawarkan tinjauan komprehensif mengenai dampak desentralisasi fiskal secara global. Namun demikian, belum ada penelitian yang secara spesifik menganalisis dinamika kemandirian fiskal dan ketimpangan pendapatan di Kabupaten Lampung Timur.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Lampung Timur periode 2023–2025? (2) Bagaimana dinamika ketimpangan pendapatan di Kabupaten Lampung Timur periode yang sama? (3) Bagaimana relasi antara kemandirian fiskal dan ketimpangan pendapatan dalam kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Lampung Timur?

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 11 November 2026

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis tingkat kemandirian fiskal, mengkaji dinamika ketimpangan pendapatan, serta mengidentifikasi relasi keduanya dalam konteks kebijakan pembangunan daerah. Urgensi penelitian ini terletak pada kontribusinya memperkaya literatur keuangan daerah untuk wilayah dengan karakteristik ekonomi pertanian dan ketergantungan fiskal tinggi, serta memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan kapasitas fiskal untuk mengurangi ketimpangan pendapatan. Selain itu, penelitian ini relevan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD) yang menuntut peningkatan kemandirian fiskal daerah secara bertahap, sebagaimana diuraikan dalam Naskah Akademik RUU HKPD yang mengacu pada teori Fiscal Federalism generasi kedua dari (Weingast, 2009).

Kontribusi kebaharuan penelitian ini terletak pada tiga aspek. Pertama, fokus analisis pada tingkat kabupaten dengan karakteristik ekonomi pertanian dominan dan ketergantungan fiskal ekstrem (KKD > 85%), yang belum pernah diteliti secara spesifik dalam literatur keuangan daerah Indonesia. Kedua, identifikasi fenomena conditional relationship antara kemandirian fiskal dan ketimpangan pendapatan, di mana mekanisme dominan penekanan ketimpangan berasal dari efektivitas penggunaan dana transfer pusat, bukan dari peningkatan PAD. Temuan ini mengkonfirmasi dan memperkaya temuan Syahrimi et al., (2025) yang meneliti pada tingkat provinsi di Sumatera. Ketiga, formulasi rekomendasi kebijakan dual-track approach yang mengintegrasikan penguatan PAD gradual dengan optimalisasi penggunaan dana transfer, memberikan alternatif strategi pembangunan inklusif bagi daerah dengan kapasitas fiskal rendah.

METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan mendeskripsikan dan menginterpretasikan fenomena kemandirian fiskal serta ketimpangan pendapatan dalam konteks kebijakan pembangunan daerah secara mendalam (Creswell & Creswell, 2018). Metode studi pustaka memungkinkan peneliti untuk menganalisis data sekunder yang telah tersedia tanpa melakukan pengumpulan data primer di lapangan, sehingga cocok untuk mengkaji kebijakan publik berbasis dokumen dan data statistik (Sugiyono, 2018). Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif, yaitu mendeskripsikan kondisi kemandirian fiskal dan ketimpangan pendapatan Kabupaten Lampung Timur periode 2023–2025, serta membandingkan dinamika kedua variabel tersebut untuk mengidentifikasi relasinya dalam kebijakan pembangunan daerah.

Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif, yaitu mendeskripsikan kondisi kemandirian fiskal dan ketimpangan pendapatan Kabupaten Lampung Timur periode 2023–2025, serta membandingkan dinamika kedua variabel tersebut untuk mengidentifikasi relasinya dalam kebijakan pembangunan daerah. Penelitian ini menggunakan kerangka teori Fiscal Federalism yang dikembangkan oleh Oates, (1972) dan diperkaya oleh teori generasi kedua dari Weingast, (2009). Kerangka teori ini membedakan desentralisasi fiskal dalam tiga level analisis. Level pertama adalah level desentralisasi administratif (administrative decentralization), yang mencakup penyerahan wewenang pengelolaan pemerintahan dari pusat ke daerah, seperti tercermin dalam struktur otonomi daerah, pembentukan peraturan daerah, dan organisasi birokrasi lokal. Level kedua adalah level desentralisasi fiskal (fiscal decentralization), yang mencakup kewenangan daerah dalam mengelola sumber pendapatan, alokasi belanja, dan hubungan keuangan dengan pemerintah pusat, yang diukur melalui indikator DOF, KKR, dan IKR. Level ketiga adalah level desentralisasi politik (political decentralization), yang merupakan keyakinan, persepsi, dan asumsi mendasar tentang legitimasi otonomi daerah dalam mensejahterakan masyarakat, yang tercermin dalam komitmen politik pemerintah daerah untuk mengurangi ketimpangan dan menciptakan pembangunan inklusif.

Ketiga level ini membentuk hierarki analisis di mana perubahan pada level yang lebih dalam memerlukan intervensi yang lebih fundamental dan berkelanjutan. Dalam konteks Kabupaten

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 11 November 2026

Lampung Timur, kerangka ini relevan untuk menganalisis bagaimana daerah tersebut tidak hanya beroperasi berdasarkan regulasi formal pada level administratif, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai pemerataan pada level fiskal, serta asumsi-asumsi mendasar tentang kemandirian daerah pada level politik. Sen, (1999) melalui pendekatan capability approach melengkapi kerangka analisis dengan menekankan bahwa pembangunan sejati adalah perluasan kebebasan substantif, yang mencakup kemampuan individu untuk mengakses peluang ekonomi dan partisipasi sosial.

Berdasarkan kerangka teori di atas, penelitian ini mengadopsi kerangka konseptual yang menggambarkan relasi antara kemandirian fiskal dan ketimpangan pendapatan dalam kebijakan pembangunan daerah:

[INPUT] → [PROSES] → [OUTPUT] → [OUTCOME]

Variabel Input:
- Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- Dana Transfer Pusat (DAU, DAK, DBH)
- Total Pendapatan Daerah (TPD)

Variabel Proses:
- Derajat Otonomi Fiskal (DOF)
- Ketergantungan Keuangan Daerah (KKR)
- Komposisi Belanja Daerah (Belanja Operasional, Belanja Modal, Belanja Tidak Langsung)

Variabel Output:
- Gini Ratio
- Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
- Persentase Penduduk Miskin

Variabel Outcome:
- Kesejahteraan Masyarakat
- Pembangunan Inklusif
- Kemandirian Fiskal Berkelanjutan

Sumber data dalam penelitian ini bersifat sekunder, mengingat pendekatan yang digunakan adalah studi pustaka. Data sekunder yang dikumpulkan meliputi: (1) data keuangan daerah berupa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), total pendapatan daerah, total belanja daerah, dan komponen-komponennya yang diperoleh dari APBD Kabupaten Lampung Timur tahun 2023–2025 serta Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan; (2) data indikator sosial-ekonomi berupa Gini Ratio, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), persentase penduduk miskin, dan pertumbuhan ekonomi yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lampung Timur dan BPS Provinsi Lampung; (3) dokumen perencanaan pembangunan daerah berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Timur; serta (4) literatur ilmiah berupa artikel jurnal, buku teks, dan laporan penelitian terkait kemandirian fiskal, desentralisasi, dan ketimpangan pendapatan (Arikunto, 2010).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi literatur. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan, mencatat, dan menginventarisasi data keuangan daerah serta data statistik sosial-ekonomi dari sumber resmi pemerintah (Sugiyono, 2018). Studi literatur dilakukan dengan menelusuri dan menganalisis artikel jurnal, buku, serta dokumen kebijakan yang relevan dengan fokus penelitian. Penelusuran data statistik daerah dilakukan secara sistematis melalui portal resmi BPS, DJPK, dan situs pemerintah daerah untuk memastikan validitas dan reliabilitas data yang digunakan (Miles et al., 2014).

Analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model interaktif Miles dkk., (2014) yang terdiri dari tiga komponen utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data keuangan serta data sosial-ekonomi yang relevan dengan rumusan masalah. Penyajian data dilakukan dalam bentuk tabel, grafik,

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 11 November 2026

dan narasi deskriptif untuk mempermudah pemahaman terhadap dinamika kemandirian fiskal dan ketimpangan pendapatan. Selanjutnya, dilakukan analisis deskriptif-komparatif untuk membandingkan kondisi kemandirian fiskal dan ketimpangan pendapatan Kabupaten Lampung Timur selama periode 2023–2025. Interpretasi hubungan antara rasio PAD dan Gini Ratio dilakukan secara kualitatif dengan mengaitkan temuan data terhadap teori desentralisasi fiskal dan kebijakan pembangunan daerah untuk menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian (Creswell & Poth, 2018).

Validitas data dalam penelitian ini dijamin melalui beberapa mekanisme. Pertama, sumber data berasal dari institusi resmi pemerintah yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lampung Timur, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, dan dokumen APBD resmi pemerintah daerah. Data dari sumber-sumber tersebut memiliki kredibilitas tinggi karena merupakan data terverifikasi dan diaudit. Kedua, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan data dari berbagai sumber resmi untuk memastikan konsistensi. Ketiga, data yang digunakan merupakan data publik yang telah melalui proses validasi oleh institusi penyedia. Reliabilitas data dijaga melalui penggunaan data sekunder yang telah dipublikasikan secara resmi dan dapat diakses publik. Seluruh data keuangan daerah diambil dari dokumen APBD yang telah disahkan oleh DPRD, sedangkan data sosial-ekonomi diambil dari publikasi resmi BPS yang telah melalui proses pengolahan data standar nasional.

PEMBAHASAN

Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur

Kemandirian fiskal daerah merepresentasikan indikator fundamental yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunannya secara mandiri tanpa bergantung pada transfer dari pemerintah pusat (Mardiasmo, 2002). Salah satu instrumen pengukuran kemandirian fiskal adalah rasio Derajat Otonomi Fiskal (DOF) yang dihitung dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Pendapatan Daerah (TPD). Formula yang digunakan adalah:

$$\text{Rasio DOF} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Hasil analisis mengindikasikan bahwa PAD Kabupaten Lampung Timur mengalami peningkatan absolut dari Rp181,49 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp249,79 miliar pada tahun 2025, dengan pertumbuhan rata-rata 17,3% per tahun. Namun, rasio DOF menunjukkan dinamika yang berbeda: 9,25% (2023), 8,88% (2024), dan 12,63% (2025), dengan rata-rata 10,25% yang masuk dalam kategori "Kurang" (Mardiasmo, 2002). Kategori ini mengindikasikan bahwa kemampuan daerah dalam membiayai pembangunannya secara mandiri masih sangat terbatas.

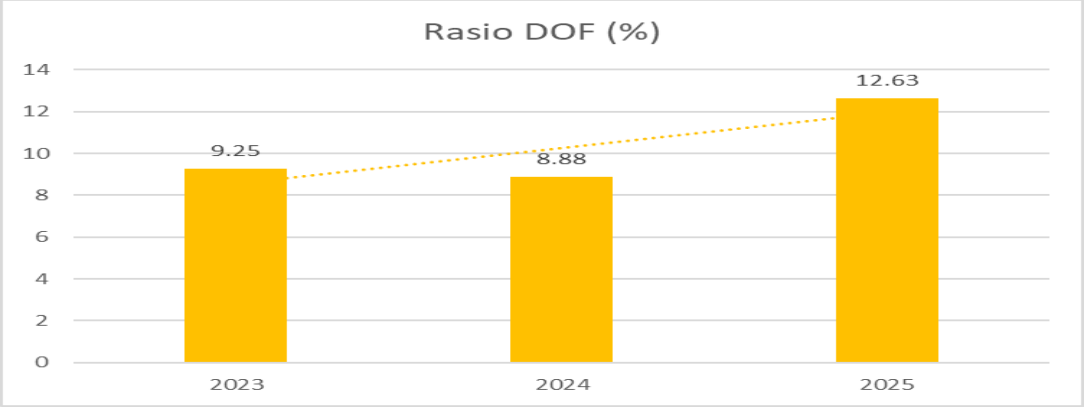
Tabel 1: Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Daerah

Tahun	PAD (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio DOF (%)	Kategori
2023	181.494.691.698,62	1.961.406.617.488,62	9,25	Sangat Kurang
2024	207.567.574.087,56	2.337.112.000.418,32	8,88	Sangat Kurang
2025	249.791.266.319,17	1.978.091.873.573,17	12,63	Kurang
Rata-rata			10,25	Kurang

Sumber: Data diolah dari APBD Kabupaten Lampung Timur 2023–2025.

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 11 November 2026

Gambar 1: Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur 2023-2025



Sumber: Data diolah dari APBD Kabupaten Lampung Timur 2023–2025.

Data di atas mengindikasikan bahwa meskipun PAD mengalami eskalasi absolut, kontribusi relatifnya terhadap total pendapatan daerah masih sangat minim. Pada tahun 2024, rasio DOF justru mengalami deklinasi menjadi 8,88% meskipun PAD naik, yang disebabkan oleh lonjakan total pendapatan daerah sebesar 19,16% akibat meningkatnya Dana Alokasi Umum (DAU). Hal ini mengkonfirmasi Akadun, (2024) mengenai pseudo-decentralization, di mana peningkatan transfer pusat justru memperlemah rasio kemandirian fiskal relatif daerah. Ketergantungan pada transfer pusat sangat tinggi dengan rasio Ketergantungan Keuangan Daerah (KKR) rata-rata 85,07% (kategori "Sangat Tinggi"), yang berarti lebih dari 85% pendapatan daerah bersumber dari dana transfer pemerintah pusat.

Dampak kapasitas fiskal yang rendah terhadap pembangunan daerah terlihat dari keterbatasan fleksibilitas anggaran. Dengan rasio DOF di bawah 15%, pemerintah daerah memiliki ruang manuver yang sangat terbatas untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan lokal (Fahriansyah & Zulfikar, 2022). Dari perspektif politik pembangunan daerah, kondisi ini menciptakan dependency syndrome yang mengurangi insentif daerah untuk mengoptimalkan potensi ekonomi lokal, karena ketersediaan dana transfer yang relatif lebih pasti dibandingkan dengan upaya penggalangan PAD.

Gini Ratio Kabupaten Lampung Timur

Ketimpangan pendapatan diukur menggunakan Gini Ratio yang merupakan indikator standar Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengukur tingkat pemerataan distribusi pendapatan atau pengeluaran penduduk. Gini Ratio memiliki rentang nilai $0 \leq G \leq 1$, di mana nilai 0 menunjukkan distribusi sempurna (sama rata) dan nilai 1 menunjukkan ketimpangan maksimal (BPS, 2021). Berdasarkan klasifikasi Todaro (dalam Institut Harkat Negeri, 2020), tingkat ketimpangan dikategorikan sebagai: rendah (0,20–0,35), sedang (0,35–0,50), dan tinggi (0,50–0,70).

Tabel 2: Gini Ratio dan Indikator Sosial-Ekonomi

Indikator	2023	2024	2025
Gini Ratio	0,315	0,278	0,261
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,44	73,05	73,92
Persentase Penduduk Miskin (%)	13,80	13,19	12,15
Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,51	4,62	4,65
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	68,74	68,91	67,64

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur dan BPS Provinsi Lampung.

Temuan ini menunjukkan trajektori penurunan Gini Ratio yang konsisten dari 0,315 (2023)

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 11 November 2026

menjadi 0,261 (2025), dengan deklinasi total 17,1% selama tiga tahun. Meskipun demikian, nilai Gini Ratio tahun 2023 (0,315) masih berada pada ambang atas kategori ketimpangan rendah menurut klasifikasi Todaro, sementara tahun 2024 dan 2025 telah masuk ke dalam kategori rendah (< 0,30). Penurunan Gini Ratio ini berkorelasi positif dengan peningkatan IPM dari 72,44 menjadi 73,92 dan penurunan persentase penduduk miskin dari 13,80% menjadi 13,19%.

Faktor-faktor penyebab penurunan ketimpangan dapat ditelusuri dari komposisi belanja daerah. Rasio keserasian belanja operasional menunjukkan kategori "Serasi" dengan rata-rata 71,79%, yang mengindikasikan bahwa sebagian besar belanja daerah dialokasikan untuk kegiatan operasional yang berdampak langsung pada pelayanan publik. Namun, rasio belanja modal hanya rata-rata 10,83% dengan kategori "Tidak Serasi", yang menunjukkan keterbatasan investasi pembangunan infrastruktur yang berpotensi menciptakan lapangan kerja dan meratakan distribusi pendapatan jangka panjang. Temuan ini sejalan dengan argumentasi Damai & Aprianti, (2024) bahwa belanja modal yang rendah membatasi kapasitas pemerintah daerah dalam menciptakan pemerataan struktural.

Dampak ketimpangan terhadap kesejahteraan masyarakat terlihat dari dinamika indeks pembangunan manusia dan tingkat kemiskinan. Meskipun Gini Ratio menurun, persentase penduduk miskin masih di atas 13%, yang mengindikasikan bahwa penurunan ketimpangan belum sepenuhnya berhasil mengangkat kelompok masyarakat paling rentan. Evaluasi pemerataan pembangunan daerah menunjukkan bahwa kebijakan redistribusi melalui belanja hibah (Rp229,38 miliar pada 2023, Rp241,17 miliar pada 2024) dan belanja bantuan sosial (Rp3,35 miliar pada 2023, Rp2,44 miliar pada 2024) berperan signifikan dalam menekan ketimpangan, meskipun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan. Ernawati dkk., (2021) menegaskan bahwa pengeluaran pemerintah daerah yang terarah pada program inklusi dapat memengaruhi pertumbuhan inklusif regional, namun efektivitasnya sangat bergantung pada orientasi belanja.

Relasi Kemandirian Fiskal dan Ketimpangan Pendapatan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah

Analisis relasi antara kemandirian fiskal dan ketimpangan pendapatan mengungkap fenomena yang kontraintuitif. Secara teoritis, teori desentralisasi fiskal yang dikemukakan Oates, (1972) menyatakan bahwa pemerintah daerah dengan kemandirian fiskal tinggi memiliki kapasitas lebih baik untuk menyediakan barang publik yang sesuai dengan preferensi lokal, yang pada gilirannya dapat mengurangi ketimpangan pendapatan. Tiebout, (1956) sebelumnya telah mengargumentasikan bahwa kompetisi antar-jurisdiksi lokal dan mobilitas penduduk dapat mengoptimalkan alokasi barang publik. Namun, data Kabupaten Lampung Timur menunjukkan bahwa penurunan Gini Ratio terjadi meskipun rasio DOF masih tergolong rendah (10,25%).

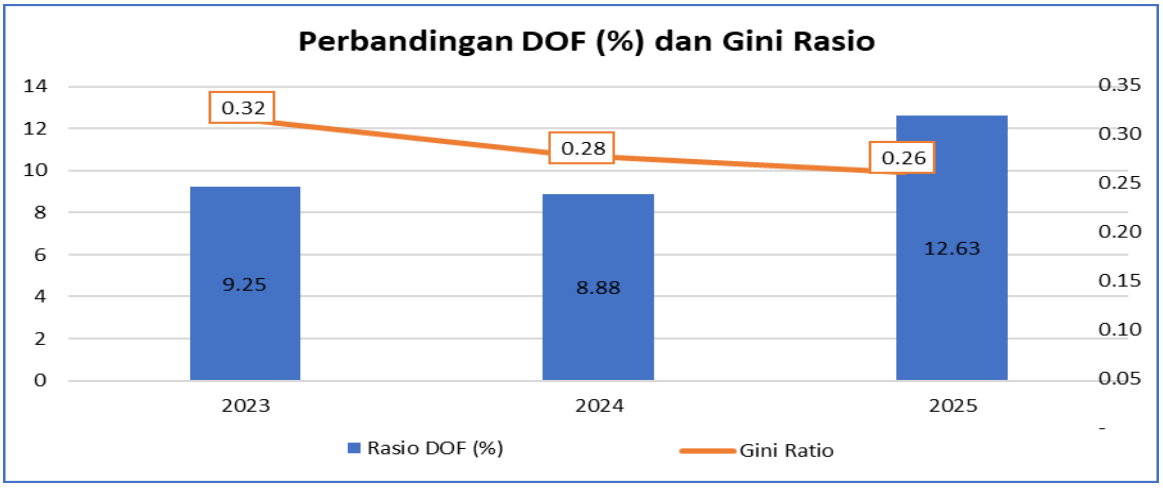
Tabel 3: Relasi Kemandirian Fiskal dan Ketimpangan Pendapatan

Tahun	PAD (Miliar Rp)	Rasio DOF (%)	KKR (%)	Gini Ratio	IPM	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2023	181,49	9,25	86,14	0,315	72,44	3,51
2024	207,57	8,88	85,57	0,278	73,05	4,62
2025	249,79	12,63	83,50	0,261	73,92	4,65

Sumber: Data diolah dari APBD Kabupaten Lampung Timur dan BPS.

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 11 November 2026

Gambar 2: Relasi Kemandirian Fiskal dan Ketimpangan Pendapatan Kabupaten Lampung Timur 2023–2025



Sumber: Data diolah dari APBD Kabupaten Lampung Timur dan BPS.

Pemaparan data di atas mengilustrasikan dinamika kompleks antara variabel-variabel tersebut. Pada tahun 2023–2024, peningkatan PAD sebesar 14,36% diikuti dengan penurunan Gini Ratio sebesar 11,75%, namun rasio DOF justru menurun 0,37 poin persen akibat lonjakan transfer pusat. Pada tahun 2024–2025, PAD meningkat 20,34% dengan rasio DOF naik 3,75 poin persen, diikuti penurunan Gini Ratio 6,12%. Korelasi negatif antara PAD dan Gini Ratio (semakin tinggi PAD, semakin rendah Gini Ratio) mengindikasikan adanya hubungan yang menguat antara kapasitas fiskal daerah dan pemerataan pendapatan, meskipun mekanismenya tidak sepenuhnya linear.

Dari perspektif teori kesejahteraan sosial, hasil ini dapat diinterpretasikan melalui pendekatan capability approach yang dikemukakan (Sen, 1999). Peningkatan PAD, meskipun proporsionalnya kecil, memberikan tambahan kapasitas fiskal bagi pemerintah daerah untuk menyediakan layanan publik dasar yang memperluas capability masyarakat dalam mengakses ekonomi. Sen, (1999) menegaskan bahwa pembangunan sejati adalah perluasan kebebasan (freedom) substantif, yang mencakup kemampuan individu untuk mengakses peluang ekonomi dan partisipasi sosial. Namun, mekanisme dominan yang menekan ketimpangan ternyata bukan berasal dari PAD, melainkan dari penggunaan dana transfer pusat yang efektif. Hal ini mengkonfirmasi temuan Syahrimi dkk., (2025) bahwa dalam konteks daerah dengan kemandirian fiskal rendah, efektivitas penggunaan dana transfer menjadi variabel krusial dalam menentukan dampak fiskal terhadap ketimpangan pendapatan.

Analisis efektivitas kebijakan pembangunan daerah menunjukkan bahwa belanja daerah yang berorientasi pada pemerataan memainkan peran penting. Belanja hibah dan bantuan sosial yang meningkat signifikan pada tahun 2024 (Rp241,17 miliar dan Rp2,44 miliar) berkontribusi pada penurunan Gini Ratio yang lebih tajam pada periode tersebut. Namun, politik anggaran yang terlalu bergantung pada belanja tidak langsung (rata-rata 68,5% dari total belanja) mengindikasikan bahwa prioritas pembangunan daerah masih berorientasi pada konsumsi jangka pendek daripada investasi produktif jangka panjang. Purwanti, (2024) mengingatkan bahwa pertumbuhan inklusif memerlukan intervensi fiskal yang tidak hanya berfokus pada transfer konsumtif, tetapi juga pada investasi infrastruktur produktif.

Evaluasi pembangunan inklusif di Kabupaten Lampung Timur menunjukkan adanya trade-off antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat dari 3,51% (2023) menjadi 4,65% (2025) tidak diikuti oleh peningkatan kemandirian fiskal yang proporsional. Kondisi ini mencerminkan fenomena growth without fiscal autonomy yang diidentifikasi Akadun,

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 11 November 2026

(2024), di mana pertumbuhan ekonomi terjadi tanpa diikuti oleh penguatan kapasitas fiskal daerah. (Sakti et al., 2024) menemukan bahwa kapasitas fiskal daerah memiliki nexus yang kompleks dengan konvergensi pembangunan inklusif, di mana transfer yang tidak diimbangi dengan penguatan PAD dapat menciptakan moral hazard bagi daerah. Dalam konteks teori politik pembangunan, kondisi ini mengindikasikan bahwa kebijakan pembangunan daerah masih bersifat top-down dan kurang mampu memanfaatkan potensi ekonomi lokal untuk menciptakan kemandirian fiskal yang berkelanjutan.

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa relasi antara kemandirian fiskal dan ketimpangan pendapatan di Kabupaten Lampung Timur bersifat conditional. PAD yang meningkat berkorelasi positif dengan penurunan ketimpangan, namun mekanisme dominan penekanan ketimpangan berasal dari penggunaan dana transfer pusat yang efektif. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan pembangunan daerah perlu mengadopsi pendekatan dual-track: memperkuat penggalangan PAD secara gradual sambil meningkatkan efektivitas penggunaan dana transfer untuk program-program pemerataan. Tanpa strategi tersebut, penurunan ketimpangan yang terjadi risiko tidak berkelanjutan apabila alokasi transfer pusat mengalami penurunan di masa mendatang.

KESIMPULAN

Penelitian ini menganalisis relasi antara kemandirian fiskal dan ketimpangan pendapatan dalam kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Lampung Timur periode 2023–2025. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh tiga temuan utama. Pertama, kemandirian fiskal Kabupaten Lampung Timur masih tergolong rendah dengan rasio Derajat Otonomi Fiskal (DOF) rata-rata 10,25% (kategori "Kurang") dan rasio Ketergantungan Keuangan Daerah (KKR) rata-rata 85,07% (kategori "Sangat Tinggi"). Meskipun Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan absolut dari Rp181,49 miliar (2023) menjadi Rp249,79 miliar (2025), kontribusi relatifnya terhadap total pendapatan daerah masih sangat kecil. Kondisi ini mencerminkan fenomena pseudo-decentralization yang mengindikasikan bahwa Kabupaten Lampung Timur secara administratif telah diberikan otonomi, namun secara fiskal masih sangat bergantung pada transfer pemerintah pusat.

Kedua, ketimpangan pendapatan di Kabupaten Lampung Timur menunjukkan tren penurunan yang konsisten dengan Gini Ratio turun dari 0,315 (2023) menjadi 0,261 (2025). Penurunan ini berkorelasi positif dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 72,44 menjadi 73,92 dan penurunan persentase penduduk miskin dari 13,80% menjadi 13,19%. Namun, mekanisme dominan penekanan ketimpangan berasal dari penggunaan dana transfer pusat yang efektif melalui belanja hibah dan bantuan sosial, bukan dari peningkatan kemandirian fiskal daerah itu sendiri. Rasio keserasian belanja modal yang hanya rata-rata 10,83% dengan kategori "Tidak Serasi" mengindikasikan keterbatasan investasi pembangunan infrastruktur yang berpotensi menciptakan pemerataan pendapatan jangka panjang.

Ketiga, relasi antara kemandirian fiskal dan ketimpangan pendapatan di Kabupaten Lampung Timur bersifat conditional dan tidak linear. Peningkatan PAD berkorelasi positif dengan penurunan Gini Ratio, namun mekanisme dominan penekanan ketimpangan berasal dari efektivitas penggunaan dana transfer pusat. Hal ini mengkonfirmasi temuan penelitian terdahulu bahwa dalam konteks daerah dengan kemandirian fiskal rendah, efektivitas penggunaan dana transfer menjadi variabel krusial dalam menentukan dampak fiskal terhadap ketimpangan pendapatan. Temuan ini juga mengindikasikan adanya trade-off antara pertumbuhan ekonomi dan kemandirian fiskal, di mana pertumbuhan ekonomi yang meningkat dari 3,51% (2023) menjadi 4,65% (2025) tidak diikuti oleh penguatan kapasitas fiskal daerah yang proporsional.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui. Pertama, periode penelitian yang relatif singkat (2023–2025, hanya 3 tahun) membatasi kemampuan untuk menguji tren jangka panjang dan keberlanjutan relasi antara kemandirian fiskal dan ketimpangan pendapatan. Kedua, pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka tidak memungkinkan pengujian hubungan kausal secara statistik melalui analisis regresi atau model ekonometrik. Ketiga, penggunaan data sekunder memiliki

keterbatasan dalam hal kontrol terhadap kualitas dan kelengkapan data, terutama untuk data tahun 2025 yang kemungkinan masih bersifat sementara. Keempat, fokus penelitian pada satu kabupaten (Lampung Timur) dengan karakteristik ekonomi pertanian dan ketergantungan fiskal tinggi membatasi generalisasi temuan terhadap daerah dengan karakteristik berbeda. Kelima, penelitian ini tidak mengukur secara langsung efektivitas program spesifik dalam menekan ketimpangan, sehingga kesimpulan mengenai mekanisme dominan bersifat inferensial berdasarkan analisis komposisi belanja. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, disampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, perlu mengadopsi pendekatan dual-track dalam kebijakan pembangunan daerah. Pertama, memperkuat penggalangan PAD secara gradual melalui optimalisasi pajak daerah, retribusi, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Efektivitas PAD yang masih tergolong "Tidak Efektif" dengan rata-rata realisasi 89,42% menunjukkan adanya ruang peningkatan yang signifikan. Kedua, meningkatkan efektivitas penggunaan dana transfer pusat untuk program-program pemerataan yang berorientasi pada pembangunan inklusif, terutama melalui peningkatan belanja modal dan investasi infrastruktur produktif yang dapat menciptakan lapangan kerja dan meratakan distribusi pendapatan jangka panjang.
2. Bagi Pemerintah Pusat, perlu merancang mekanisme transfer yang tidak hanya berfokus pada pemerataan vertikal tetapi juga mendorong kemandirian fiskal daerah secara bertahap, sejalan dengan mandat UU Nomor 1 Tahun 2022. Selain itu, perlu memberikan insentif fiskal bagi daerah yang berhasil meningkatkan rasio PAD sebagai stimulus kemandirian fiskal, serta memperkuat kapasitas aparatur daerah dalam pengelolaan keuangan dan perencanaan pembangunan berbasis data.
3. Bagi Peneliti Mendatang, disarankan untuk melakukan studi longitudinal dengan periode yang lebih panjang minimal 10 tahun untuk menguji keberlanjutan temuan penelitian ini. Selain itu, menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi panel untuk menguji hubungan kausal antara kemandirian fiskal dan ketimpangan pendapatan secara empiris, serta melakukan studi komparatif antar-kabupaten dengan karakteristik ekonomi pertanian serupa untuk memperkuat generalisasi temuan.

REFERENSI

Akadun, A. (2024). Analysis of pseudo-decentralization and financial dependency in the implementation of regional autonomy in Sumedang regency of Indonesia. *Public Policy and Administration*, *23*(1), 9–22. https://doi.org/10.5755/j01.ppaa.23.1.33295

Arikunto, S. (2010). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik* (15th ed.). Rineka Cipta.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications.

Damai, A., & Aprianti, Y. (2024). The impact of fiscal policy on the underprivileged population in Indonesia. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, *12*(3), 321–342. https://doi.org/10.33701/jpppd.v12i3.XXX

Ernawati, E., Tajuddin, T., & Nur, S. (2021). Does government expenditure affect regional inclusive growth? An experience of implementing village fund policy in Indonesia. *Economies*, *9*(4), 164. https://doi.org/10.3390/economies9040164

Fahriansyah, & Zulfikar, A. (2022). Analisis kemandirian keuangan daerah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kaimana. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, *2*(2), 98–114. https://doi.org/10.33701/jtpm.v2i2.2666

Farida, N., Suman, A., & Sakti, R. K. (2021). Fiscal decentralization, economic growth and regional development inequality in eastern Indonesia. *Jurnal Indonesiana Applied Economics*, *9*(2), 1–9.

Herianti, E., & Marundha, A. (2024). Examining the effects of fiscal decentralization and income inequality on the economic performance of West Sumatra Province, Indonesia. *Global Business & Finance Review*, *29*(7), 63–77. https://doi.org/10.17549/gbfr.2024.29.7.63

Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan manajemen keuangan daerah* (2nd ed.). ANDI.

Martinez-Vazquez, J., Lago-Peñas, S., & Sacchi, A. (2017). The impact of fiscal decentralization: A survey. *Journal of Economic Surveys*, *31*(4), 1095–1129.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

Musgrave, R. A. (1959). *The theory of public finance: A study in public economy*. McGraw-Hill.

Oates, W. E. (1972). *Fiscal federalism*. Harcourt Brace Jovanovich.

Purwanti, D. (2024). Inclusive economic growth and fiscal intervention: Could it reduce poverty, inequality, and unemployment in East Java? *Jurnal Ekonomi Studi Pembangunan*, *25*(1), 148–166.

Sakti, R. K., Bintoro, N. S., Setyanti, A. M., & Agustin, R. A. (2024). Exploring the nexus between regional fiscal capacity and the convergence of inclusive economic development. *Journal of Contemporary Government and Public Policy*, *5*(1), 55–70.

Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.

Siburian, M. E. (2020). Fiscal decentralization and regional income inequality: Evidence from Indonesia. *Applied Economics Letters*, *27*(17), 1383–1386.

Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Syahrimi, Yulianita, A., & Hidayat, A. (2025). The effect of inflation and fiscal decentralization on income inequality in Sumatra Island of Indonesia: A panel data. *Theoretical and Applied Economics*, *32*(1), 167–186. https://doi.org/10.24818/EA/2025/64/1.642.11

Syarifudin, A., & Suwandi, E. D. (2025). Ketimpangan fiskal pasca UU HKPD: Analisis PDRD, kemandirian, dan pola belanja kabupaten/kota di Jawa Tengah. *Senatib*, *7*(1). https://doi.org/10.47701/59eeb405

Tiebout, C. M. (1956). A pure theory of local expenditures. *Journal of Political Economy*, *64*(5), 416–424.

Weingast, B. R. (2009). Second generation fiscal federalism: The implications of fiscal incentives. *Journal of Urban Economics*, *65*(3), 279–293.